

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA PADANG PANJANG

TAHUN : 2023

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</p> <p>Tujuan : Terlaksananya Musrenbang RKPD tingkat Kota</p>	<p>-Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni UU No 25 tahun 2004 dan Permendagri No 86 tahun 2017, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan <i>top down, bottom up</i>, teknokratik, politis, aspiratif.</p> <p>-Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan <i>bottom up</i> dan aspiratif</p> <p>-Kondisi saat ini pada RKPD tahun 2021 dan 2022 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain : disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin, perempuan (janda), dll masih minim.</p> <p>-Usulan masyarakat lebih banyak di bidang fisik prasarana, usulan yang menjadi kebtuhan</p>	<p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan tidak menjangkau semua komponen masyarakat <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki - Usulan perwakilan kelurahan dan kecamatan didominasi laki-laki <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musrenbang hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan <p>Manfaat</p> <p>Kemampuan masyarakat menentukan usulannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kegiatan belum responsif gender - Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan responsive gender - Pengusulan kegiatan baru tidak dapat dilakukan apabila tidak masuk dalam e-planning - Dengan pemberlakuan PPKM maka kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Pelaksanaan kegiatan musrenbang lebih mengutamakan seremonial daripada substansi pembahasan - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan dan DPRD masih sedikit - Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas 	<p>Terakomodirnya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pelaksanaan perencanaan responsive gender - Penyelenggaraan musrenbang dengan mengundang keterwakilan perempuan minimal 30% - Pelaksanaan musrenbang guna peningkatan dengan menyampaikan kualitas perencanaan, tahapan-tahapan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan musrenbang tahun 2020 dan 2021 peserta yang hadir 155 orang. - Komposisi jenis kelamin 74% laki-laki dan 26% perempuan. - Komposisi elemen yang hadir pemerintah 40%, swasta 2%, masyarakat 58% (ormas, LSM) - Komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) 3% pemuda (18 – 30 th) 15% dewasa (30 – 60 th) 75% lansia (60 th ke atas) 7% - Tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan 	<p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</p> <p>Input : Rp. 68.470.000,-</p> <p>Output : Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan</p> <p>Outcome : Terlaksananya kordinasi perencanaan pembangunan</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	<p>mayoritas perempuan, lansia maupun disabilitas masih jarang</p> <p>-Komposisi jenis kelamin 74% laki-laki dan 26% perempuan.</p> <p>-Komposisi elemen yang hadir pemerintah 40%, swasta 2%, masyarakat 58% (ormas, LSM)</p> <p>-Komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) 3% pemuda (18 – 30 th) 15% dewasa (30 – 60 th) 75% lansia (60 th ke atas) 7%</p> <p>Tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan musren bang tahun 2020 dan 2021</p>	tergantung pada prioritas pembangunan daerah		<ul style="list-style-type: none"> - pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - Musrenbang belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk didukung oleh penganggaran yang maksimal - Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan 			<ul style="list-style-type: none"> - musrenbang tahun 2020 dan 2021 - Kurangnya usulan masyarakat berbasis gender - Terakomodirnya usulan musrenbang dalam Renja Perangkat Daerah 	

Padang Panjang, 7 Maret 2022

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



RUSDYANTO, S.IP, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19640402 198602 1 003

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN : 2023

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>Tujuan : Terwujudnya perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, Terwujudnya koordinasi penurunan stunting</p>	<p>-Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah membentuk Pokja PUG yang salah satu tugasnya menyusun perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender.</p> <p>-Kondisi saat ini di Kota Padang Panjang Pelaksanaan PPRG belum berjalan maksimal ditandai dengan Pokja PUG baru sebatas SK</p> <p>-Pemahaman Kepala OPD terkait dengan PUG belum Optimal</p> <p>-PUG masih dianggap sebagai tugas tambahan</p> <p>-Fokal Point dimasing OPD belum berjalan optimal ditandai dengan belum semua OPD mempromosikan PUG di masing masing OPD dan PUG belum dianggap</p>	<p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya informasi terkait dengan PUG dan PPRG - Kurangnya pemahaman ASN tentang PUG dan PPRG <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Kepala OPD masih kurang ditandai dengan minimnya kehadiran pada pelaksanaan Sosialisasi atau dalam menindaklanjuti dalam penyusunan GAP dan GBS <p>Kontrol Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manfaat penerapan GAP GBS dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas OPD tentang pentingnya PUG 	<ul style="list-style-type: none"> - PUG dianggap tidak menarik dan dianggap hanya mengurus masalah perempuan saja - Masih kurangnya partisipasi stakeholders dalam mendukung PUG 	<p>Terwujudnya Perencanaan yang Responsif Gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan surat edaran pelaksanaan PUG pada masing-masing OPD - Penelaahan GAP dan GBS OPD - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PUG 	<ul style="list-style-type: none"> - OPD yang sudah membuat GAP dan GBS sudah 24 OPD - Rapat monitoring pelaksanaan GAP dan GBS dilingkup Pemko Padang Panjang 	<p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>Input; Rp. 29.986.800,-</p> <p>Output: Jumlah kegiatan yang responsive gender dalam musrenbang</p> <p>Outcome; Terakomodirnya perencanaan pembangunan berbasis gender</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	- Sebab Kesenjangan Internal	- Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	- Rencana Aksi	- Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	sebagai kebutuhan Belum semua OPD menindaklanjuti terkait Rekomendasi Kebijakan yang dikeluarkan Walikota Padang Panjang untuk mencantumkan Dasar Hukum, data terpilah dan isue gender di dalam Renstra OPD.	penurunan stunting tidak langsung terasa - Belum semua OPD merasakan manfaat pelaksanaan GAP DBS	-	-			-	-

Padang Panjang, 7 Maret 2022

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



RUSDianto, S.IP, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19640402 198602 1 003